

LAMPIRAN

1. Sinopsis

Tampak alam kubur, alam sebelum peradilan agung terjadi. Tampak pula di situ, sederetan arwah duduk bersila. Di tengah altar terdapat segundukan tanah, dan di dekatnya duduk bersila seorang wanita (*Tokoh*). Tidak jauh dari *Tokoh*, seorang perempuan lain (*Hakim*) duduk di atas sebuah kursi putar. Terdengar suara-suara kesunyian malam, dan rintihan gadis yang tidak putus-putusnya, serasa menyayat hati. Suara-suara tersebut mengundang rasa iba pada diri *Tokoh*. *Tokoh* lantas bergumam pada diri sendiri. Demi mendengar gumaman *Tokoh*, *Hakim* pun mulai berkomentar. Terjadilah percakapan di antara keduanya. Seorang *Ibu* tiba-tiba datang dan bicara tentang segala dukanya. Dan ratapan-ratapan kembali terdengar.

Suasana mendadak berubah menjadi suasana para buruh pabrik yang bubar bekerja. *Corong* meneriaki para buruh untuk segera bubar. Tampak *Itut*, *Nining* dan *Kuneng* di antara para buruh tersebut. *Kuneng* sakit, dan hal ini dimanfaatkan oleh *Corong*, yang sebelumnya telah berhasil mengusir *Itut* dan *Nining* untuk segera bubar. *Corong* lantas menggoda *Kuneng* yang tinggal sendirian dan dalam keadaan sakit, namun keburu *Itut* dan kawan-kawan muncul kembali, dan langsung mengeroyok *Corong*. Datanglah *Kepala Petugas* untuk meminta pertanggungjawaban atas pengeroyokan terhadap *Corong*. Terjadilah percakapan sengit antara *Itut*, sebagai juru bicara para buruh, dengan *Kepala Petugas* sebagai wakil "penguasa" dalam perusahaan. Namun *Itut* dan kawan-kawannya berhasil

mengusir *Kepala Petugas*, dan segera mengembalikan suasana pada keadaan semula.

Di altar, kembali *Hakim* dan *Tokoh* dalam keadaan lengang dan mencekam melihat kejadian tersebut. Suara rintihan masih terdengar. *Hakim* dan *Tokoh* terlibat lagi dalam pembicaraan serta sama-sama mempertahankan argumentasi masing-masing yang di latari dengan peristiwa peristiwa buruh pabrik tersebut.

Terdengarlah koor pembacaan ayat-ayat suci untuk pengiring jenazah. *Kuneng* mati gantung diri. Suasana kembali beralih pada percakapan *Itu* dan *Nining* yang mengomentari kematian *Kuneng*. Para pelayat seolah diingatkan oleh *Lelaki I* dan *Lelaki II* akan hikmah kehidupan yang tidak hanya menimpa *Kuneng*, tetapi juga barangkali juga terjadi pada orang lain. Iring-Iringan jenazah *Kuneng* menghilang, lantas terdengarlah suara yang membacakan dua kalimat syahadat. Kemudian *Ibu* muncul dan bergumam apa adanya.

Suasana altar kembali mencekam dan tinggallah *Hakim* dan *Tokoh* dengan perasaannya masing-masing. Lagi-lagi mereka berseberangan pendapat. Di tengah silang pendapat mereka, *Hakim* kemudian menyodorkan *Lelaki III*, yang ternyata juga berseberangan pendapat dengan *Tokoh*. *Hakim* dan *Lelaki III* seolah-olah merupakan simbol dari penguasa yang tidak begitu menghiraukan nasib kaum jelata dan ingin enaknyanya sendiri. *Tokoh* beserta arwah-arwah yang lain merupakan arwah-arwah yang penasaran menginginkan keadilan yang terenggut oleh manusia lain dalam kehidupannya. Setelah *Tokoh* mengusir kehadiran *Hakim* dan *Lelaki III*, ia tinggal sendirian bersama rasa dendamnya. Lantas terdengarlah senandung

Ibu yang sedikit menentramkan hati *Tokoh*. Kembali *Ibu* menyadarkan *Tokoh* akan sedikit arti kehidupan yang masih sebagian menjadi misteri. Di tengah kegalauan *Tokoh*, yang masih mencari arti keadilan dalam kehidupan, terdengarlah *Suara dari Langit*. *Tokoh* kembali meraung-raung demi kepastian keadilan hidup, hingga dirinya terkapar di tengah gundukan tanah. *Ibu* melintasi altar kemudian menghilang. Tinggallah suara-suara dzikir yang terus-menerus berkumandang: "Yaa arhamar raahimiin ir hamna..."

2 Biografi Pengarang dan Karyanya

2.1 Riwayat Hidup dan Latar Belakang Sosiokultural Pengarang

Ratna Sarumpaet lahir di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, tanggal 16 Juli 1949. Dia lahir sebagai anak keempat dari pasangan Saladin Sarumpaet dan Julia Hutabarat. Ratna Sarumpaet dibesarkan di lingkungan keluarga yang banyak bergelimang dengan masalah politik (*Mutiara*, 5 Oktober 1991). Saladin Sarumpaet, ayahnya, adalah bekas tokoh PRRI serta anggota DPR Pusat Parkindo. Selain itu, beliau juga mantan ketua Dewan Gereja Indonesia. Ibunya, Julia Hutabarat, juga seorang aktifis pergerakan wanita dan pernah menjabat anggota Dewan Konstituante. Julia Hutabarat juga mempunyai sekolah perempuan di Tarutung yang diberi nama Sekolah Guru Puteri. Tidak hanya itu, Julia Hutabarat juga pendiri majalah wanita pertama di Sumatera Utara, yang berbahasa Batak, yakni "Melati".

Keluarga Sarumpaet telah melahirkan nama-nama terkenal di bidang teater, film dan sastra. Ayah Ratna Sarumpaet, sebelum menapaki dunia politik,

pernah mempunyai grup drama sendiri dan menyutradarai beberapa lakon pertunjukan. Ayahnyalah yang menjadi titik sentral dalam keluarga dan yang menempe anak-anaknya sejak dini hingga lahir manusia yang mempunyai cita-cita besar. Sebenarnya Ratna Sarumpaet memiliki sepuluh saudara kandung, namun yang tertua, Pollak, telah meninggal. Santi Sarumpaet yang tertua, disusul berturut-turut Mutiara, Emmy, Ratna, Riris, Netty, Elsa, Sam dan Amir Sarumpaet. Mutiara Sani, kakak Ratna Sarumpaet, merupakan istri sutradara terkenal, Asrul Sani (alm), dan merupakan bintang sinetron yang sudah menjadi idola penonton di zamannya karena sering tampil sebagai tokoh wanita yang tegar. Sam Sarumpaet (adik Ratna Sarumpaet) adalah sutradara muda yang karya-karyanya turut meramaikan pentas sinetron TVRI. Riris K. Toha (adik Ratna Sarumpaet) adalah doktor dalam bidang sastra Indonesia yang juga sering mengantarkan acara "Pembinaan Bahasa Indonesia" di TVRI. Netty Sarumpaet (adik Ratna Sarumpaet) pernah mendukung sinetron "Selembut Mama" dan "Calon Ibu". Amir Sarumpaet (bungsu), menjadi ilustrator musik dalam beberapa sinetron, di antaranya "Selembut Mama" dan "Bayangan Memudar". Santi Sarumpaet, aktif berkesenian di lingkungan gereja HKBP Rawamangun. Emmy Sarumpaet, sambil menjadi perawat di rumah sakit Tebet, juga aktif berkesenian di lingkungan kerjanya. "Orang tua kami memang seniman dan aktif menulis. Bakat ini menurun pada anak-anaknya. Sebagai politikus dan penulis, ayah-ibu kami adalah kutu buku", ungkap Mutiara Sani dalam majalah *l'emina* (21-27 Februari 1991). Bahkan menurut Riris Sarumpaet, dinding rumah mereka penuh dengan buku, yang mencakup segala bidang, mulai dari sosial, politik, ekonomi,

kebudayaan dan kesenian terutama sastra dan drama. Iklim keluargalah yang mendorong ketertarikan anak-anak Sarumpaet pada seni, khususnya seni sastra. Sejak dini, selain mengenal banyak buku, mereka aktif dalam kegiatan seni di gereja, baik itu dalam paduan suara maupun pementasan drama. Untuk itu mereka juga mempunyai kemampuan memainkan alat musik seperti organ seruling.

Ratna Sarumpaet menikah dengan Ahmad Fahmi, seorang pengusaha dan pemilik diskotik "Tanamur" di Jakarta Pusat, tahun 1971. Dari pernikahan mereka, lahir empat orang anak, yang mereka beri nama berturut-turut; Mohammad Iqbal, Fathom Saulina, Ibrahim dan Atiqah Hosiholan. Seperti halnya Ratna, suaminya pun memiliki darah seni. Mereka berdua sempat tampil sebagai seniman keramik dan ketika itu Fahmi ternyata lebih banyak berperan. Suami Ratna inilah yang bersedia memikul kerugian dalam pementasan perdana Ratna pada tahun 1973. Sayang perkawinan mereka cuma bertahan selama empat belas tahun. Tahun 1985, Ratna dan Fahmi berpisah secara baik-baik. Tentang perceraianya tersebut, Ratna mengungkapkan, "Ada hal yang membuat kami tidak cocok, lebih baik berpisah. Kami sama-sama seniman, barangkali ego kami sama-sama keras" (*Kiblat*, 28 November - 11 Desember 1990). Kini Ratna Sarumpaet tinggal bersama keempat permata hatinya, di Kampung Melayu Kecil V / 24 Tebet, Jakarta. Di mata anak-anaknya, Ratna adalah ibu yang baik dan penuh perhatian, yang menyambut hangat cium tangan mereka sebelum berangkat dan sepulang dari sekolah. Sebagai seorang sutradara, Ratna tidak pernah berharap anak-anaknya mengikuti jejaknya. Ratna tidak akan mengarahkan anak-anaknya untuk jadi seniman, tetapi mendorong mereka untuk menyelesaikan

pendidikan terlebih dahulu, setidaknya SLTA, dan untuk selanjutnya mereka bebas menekuni bidang apa saja. Dalam majalah *Femina* (21-27 Februari 1991), Ratna mengakui, "Yang Saya kontrol benar pada mereka (anak-anaknya), adalah belajar musik. Saya ingin anak-anak punya dasar musik yang kuat. Mereka semua bisa main piano. Selanjutnya ada yang belajar saxophone dan drum. Anak I Saya, sudah ada niat untuk memperdalam film. Mereka sudah bisa diajak diskusi mengenai seni, terutama teater". Ketika majalah *Kiblat* (28 November - 11 Desember 1990), menanyakan kepada Ratna tentang keinginan untuk menikah lagi, dirinya menjawab bahwa keinginan itu tentu ada. Menurut pengakuannya, memang sudah banyak lelaki yang mendekatinya dan di antaranya banyak pula yang serius untuk menjadi suaminya. Namun Ratna bersikap lebih selektif, karena bagaimanapun rumah tangga bukanlah hal yang main-main.

Ratna Sarumpaet yang merupakan anak seorang pendeta ini, masuk agama Islam tahun 1973, dua minggu sebelum anak pertamanya lahir. Ratna yang pengagum Nabi Muhammad ini, menyatakan bahwa ia masuk Islam karena mendengar suara adzan subuh. Biasanya tidak ada perasaan apa-apa bila mendengar adzan. Tetapi di tahun itu, ada rasa yang lain yang bergolak dalam hatinya. Sejak saat itu setiap kali mendengar adzan, hatinya tergetar hebat. "Alangkah indahny suara itu, alangkah merdunya", serunya. Dan lewat proses yang cukup panjang, Ratna selanjutnya memutuskan untuk pindah agama. Keputusan yang ia ambil itu, tentu saja menggegerkan keluarganya. Ayah dan ibunya marah besar serta sangat menentang akan sikap yang diambilnya. Tetapi Ratna Sarumpaet tenang-tenang saja, sebab ia sudah memperhitungkan hal

tersebut bakal terjadi. Ratna berkilah bahwa ia sudah dewasa dan sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Argumentasinya yang kuat tersebut, akhirnya membuat orang tuanya tidak berdaya untuk memaksanya kembali ke agama semula.

2.2 Perjalanan Dunia Teater Pengarang

Panggung teater mulai menyentuh Ratna Sarumpaet, ketika ia duduk di bangku kuliah pada Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Kristen Indonesia (*Mutiara*, 5 Oktober 1991). Dalam majalah *Femina* (21 - 27 Februari 1991) Ratna mengaku bahwa secara naluriah, sejak kecil memang ia sudah tertarik dengan drama. "Segala tingkah laku orang, suka saya tiru dan saya senang tampil di muka umum, dan saya merasa sudah dibentuk untuk tertarik pada dramaturgi". Kehadirannya di dunia teater, merupakan proses alami. "Dalam diri saya seperti ada sesuatu yang menggeliat, apabila saya menyaksikan sebuah pementasan teater", ucapnya. Sewaktu keluarga Sarumpaet pindah ke Jakarta, setelah bermukim beberapa lama di Yogyakarta, Ratna sudah mulai tertarik menonton drama di TIM (Taman Ismail Marzuki). " Saya melihatnya dengan kaca mata yang lain sehingga ada rangsangan untuk terlibat dan kalau mungkin berkarya", ujarnya. Ratna kemudian bergabung dengan Bengkel Muda Rendra untuk memperdalam pengetahuan tentang dunia teater. Di sini Ratna cuma bertahan kurang lebih sembilan bulan saja. Menurut pengakuannya, di Bengkel Tetaer Rendra dia menemukan rasa tidak puas dalam sikap penyutradaraan. "Inilah yang mendorong saya untuk membentuk kelompok sendiri dan



menyutradarainya, meskipun untuk itu saya tinggalkan sekolah. Saya tidak mau membohongi orang tua", kisah Ratna.

Karena kecintaannya pada dunia teater itulah, akhirnya pada tahun 1969, ia terjun total ke dunia teater. Kuliahnya di Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Universitas Kristen Indonesia, ia tinggalkan pada tahun ketiga, padahal ia tergolong jago Matematika. Menurut dia, orang tuanya memang mengharapkan anak-anaknya meraih gelar sarjana, karena bagaimanapun sarjana masih dianggap 'pangkat' tertinggi oleh mereka. Namun apa daya 'darah' yang mengalir dalam dirinya lebih tertuju pada seni, sehingga tidak mungkin bisa dipaksa. Untuk selanjutnya, Ratna diterima sebagai mahasiswa luar biasa pada Akademi Seni Drama dan Film Indonesia (Asdrali). Ia sengaja mengumpulkan uang untuk belajar teater, film dan penyutradaraan di Warner Bross, MGM dan Broadway New York Amerika Serikat selama tiga tahun.

Tahun 1973, Ratna Sarumpaet mendirikan dan memimpin grup teater sendiri, yang ia beri nama "Satu Merah Panggung". Nama Satu Merah Panggung dianggap pantas untuk grupnya yang artinya kira-kira satu kesatuan ide atau konsep. Merah berarti berani, yakni berani tampil, tidak sekedar mengeluh, melihat perkembangan dunia teater yang tersendat-sendat (*Kiblat*, 28 November-11 Desember 1990). Lewat sanggarnya Satu Merah Panggung, Ratna berhasil menorehkan namanya sebagai sutradara wanita pertama dalam dunia keteateran, sekaligus merangkap sebagai pemain dan penulis skenario (*Famili*, 1-15 Juli 1992). Grup Satu Merah Panggung yang ia pimpin tidak mempunyai anggota tetap, dengan alasan untuk menghindari munculnya primadona.

Pementasan perdana Satu Merah Panggung, September 1974, ditandai dengan karya "Rubayyat Omar Khayam", sebuah drama Islam yang diangkat dari syair-syair mistis Omar Khayam, setelah kelompok tersebut berlatih kurang lebih lima bulan. Pementasan perdana ini, dipentaskan di TIM, padahal waktu itu untuk dapat tampil di TIM harus melewati birokrasi yang sulit bagi kelompok teater baru. Syarat grup teater junior baru diperkenankan pentas di TIM apabila grup tersebut sudah tiga kali berturut-turut menjadi juara festival teater. Sebagai grup teater yang baru, sebenarnya Satu Merah Panggung tidak layak di TIM, karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Kalaupun "Rubayyat Omar Khayam" bisa tampil di TIM, itu karena Ratna menempuh birokrasi yang tidak semestinya, yaitu dengan membayar sewa tempat, yang kala itu Rp. 600.000,00. Dan lagi, bagi Ratna uang sebanyak itu bukanlah soal, asal dapat tampil di TIM. Kebetulan juga, suami Ratna cukup kaya, jadi segala sesuatu cepat beres. Begitulah akhirnya, teater Satu Merah Panggung berhasil tampil di TIM tanpa jalur festival. Tetapi "Rubayyat Omar Khayam" yang dipentaskannya, nyaris tanpa penonton alias tidak laku. Namun sebaliknya, sejak pementasan Rubayyat Omar Khayam, perjalanan Ratna di panggung Teater agak mulus, terutama menyangkut izin pementasan. Kendatipun demikian, pengakuan terhadap eksistensinya sebagai sutradara panggung masih bernada sumbang. Maret 1975, ia mementaskan "Romeo dan Juliet" ketika itu memang kurang bagus. Kalaupun jumlah penonton luar biasa, mungkin karena kehadiran Achmad Albar yang pada saat itu sedang berada pada puncak pamornya. Ratna diserang habis-habisan oleh para pengamat

seni dan dikira hanya membuat sensasi. Padahal menurut pengakuan Ratna, apa yang dilakukannya hanyalah sebuah eksperimennya di dunia teater.

Tahun 1976, Ratna ditawari bekerja di Amerika Serikat sekitar 1,5 – tahun. Tercatat pula dalam *MNBT* (1997: 115), antara tahun 1976 – 1988, Ratna meninggalkan dunia teater dan menggeluti dunia film dan TV/video. Pada masa ini ia berhasil merampungkan beberapa karya dokumenter. Ratna juga terlibat dalam pembuatan film layar lebar, “Cintaku di Rumah Susun” dan “Nagabonar”, sebagai staff editor. Ratna juga mendirikan dan mengelola KKI (Kine Klub Indonesia), sebuah lembaga cinema yang mencoba membahas tentang dunia perfilman Indonesia. Dia juga menjadi salah satu staff editing film Jakarta. Film kerja sama Indonesia-Amerika ini memberinya pengalaman kerja bersama tenaga profesional di MGM, Los Angeles, USA.

Tahun 1989, setelah absen selama 13 tahun, Ratna memutuskan untuk kembali ke dunia teater dan berjanji bahwa dalam berkarya, teater akan menjadi prioritas utama. Ia kembali muncul dengan menyutradarai “Hamlet” karya Shakespeare versi Bali. Antara tahun 1989-1992, berturut-turut mementaskan “Othello” karya Shakespeare, “Romeo dan Juliet” karya Shakespeare, “Antigone” karya Jean Anouilh dalam versi Batak. Dalam pertunjukan “Antigone”, Ratna mendapat sambutan positif dari kalangan teater tanah air. Bahkan Wiratmo Sukito, pengamat teater kawakan mengatakan, “Dari semua produksi teater Satu Merah Panggung, yang disutradarai Ratna Sarumpaet, “Antigone”-lah yang paling mengesankan. Di tangan Ratna, “Antigone” berubah menjadi feminis yang absen dari karya Anouilh”, (*Mutiara*, 5 Oktober 1991).

Wanita yang jauh dari kesan basa-basi dan formal ini, mengaku kemampuannya tidak di bawah pria. “Bahwa Tuhan memberi saya kelebihan dibandingkan dengan wanita lain, itu mungkin. Tapi bukan berarti kemampuan saya lebih rendah dari laki-laki”, demikian ungunya dalam majalah *Kiblat* (28 November – 11 Desember 1990). Kiat Ratna Sarumpaet untuk terus bergelut dengan teater cukup *simple*, yakni ‘bertahan’. Sebab masalah itu datangnya tidak selalu dari lingkungan, tetapi terkadang berasal dari diri sendiri. Sebagai contoh, walaupun ia bergelut puluhan tahun di teater, ia mengaku tidak bergelimang materi, malah sebaliknya, materi yang diperolehnya tersedot di teater. Namun demikian, kepuasan selalu diperoleh Ratna Sarumpaet setiap kali mementaskan drama. “Biasanya paling tidak 2/3 penonton di gedung kesenian akan berdiri memberi tepuk tangan se usai pementasan. Ini menandakan bahwa yang saya sampaikan dapat diterima”, ujar Ratna (*Femina*, 21 – 27 Februari 1991). Ratna merasa yakin dan percaya, bahwa melalui teater dirinya bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Ratna lebih tertarik ke teater dan bukan film karena menurutnya iklim perfilman nasional tidak obyektif dan birokratis, serta dalam pembinaannya kurang efisien.

2.3 Merambah Dunia Politik

Ternyata Ratna Sarumpaet tidak selalu berkuat dengan masalah teater dan dunia kesenian saja. Namun demikian, kepedulian sosialnya juga cukup tinggi. Dia sangat tidak bisa menutup mata begitu saja atas terjadinya ketidakadilan yang sering terjadi di negara yang ia cintai. Tidak jarang ia bersama kelompok teater

Satu Merah Panggung yang ia pimpin, turun ke jalan mengadakan demo atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang sedang berlangsung. Akibatnya ia sering berhubungan dengan aparat keamanan. Berbagai surat peringatan sering tertuju untuk dia, agar menghentikan “gerakannya” demi stabilitas negara. Tahun 1993, Ratna Sarumpaet beserta anak buahnya yang tergabung dalam Satu Merah Panggung, menyokong dengan cara ikut bergabung turun ke jalan dengan para seniman Surabaya, yang sedang demonstrasi atas kasus Maumere. Kebenciannya pada rezim Soeharto dengan Orde Barunya, yang semakin hari semakin parah dalam hal kebijaksanaan, yang menimbulkan banyak korban kesewenang-wenangan, justru membuat ia semakin berani menggalang kekuatan untuk melawannya.

Supremasi hukum sudah tidak dapat ditegakkan lagi. Hukum senantiasa berpihak pada kaum penguasa dan yang memiliki modal besar saja. Kalaupun ada yang mengadakan gerakan massa yang sedikit saja, sudah dicap oleh pemerintah sebagai tindakan subversiv, oknum yang tidak bertanggung jawab dan diberi julukan PKI (yang pada masa Orde Baru, cap PKI adalah seburuk-buruknya orang-dalam bidang politik, dan harus dijauhi). Dengan ketimpangan yang semakin hari semakin parah saja wajarlah bila kelompok-kelompok masyarakat, mencoba mendobrak kemapanan Orde Baru yang sering bertindak sewenang-wenang. Perjuangan semacam ini tentu saja tidak mudah. Para kelompok yang berseberangan dengan pemerintah harus berurusan dengan aparat negara yang bersifat militerisme. Tidak tanggung-tanggung, bagi orang yang mengadakan perlawanan kebijakan negara, segera diculik maupun ditangkap dan tidak jarang

masuk penjara tanpa adanya persidangan. Dan sudah menjadi rahasia umum, di dalam penjara, sering dilakukan penyiksaan dan intimidasi oleh para aparat tersebut. Dengan sistim militerisme ini, banyak orang yang ketakutan, dan memilih untuk tidak “berjuang”. Dan justru inilah yang diharapkan oleh rezim Orde Baru, menebarkan ketakutan agar tidak melawan rezim tersebut.

Tahun 1997, Ratna Sarumpaet sempat ditahan dan diinterogasi, karena bersama teaternya, Satu Merah Panggung, mengusung keranda demokrasi dalam kampanye PPP, yang ia dukung.

Pada akhirnya, melihat keadaan politik, ekonomi, sosial yang tidak menentu di negara Indonesia, dan dijumpai pula banyak kecurangan dan tindak sewenang-wenang, Ratna tidak bisa tinggal diam. Menjelang Sidang Umum MPR lima tahunan 1998, yang nantinya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, suasana perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Banyak gerakan massa dilakukan oleh para mahasiswa dan LSM – LSM baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai petisi, surat terbuka maupun poster dan pamflet dilontarkan pada MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, dengan maksud menolak Soeharto untuk memimpin Indonesia yang keenam kalinya. Semula Ratna hanya menyokong gerakan-gerakan tersebut dari belakang saja, maksudnya tidak terlibat secara langsung. Namun akhirnya ia sudah tidak kuat lagi menahan gejolak emosinya pada rezim Orde Baru. Ketika di Jakarta sedang berlangsung Gerakan Perubahan untuk Negara Indonesia, dengan cara memakai pita putih di tangan, Ratna segera menyambut gerakan itu, dan ikut memakai kain putih di tangannya. Ini adalah gerakan simbolik bagi orang-orang yang menginginkan perubahan di

Indonesia. Walaupun gerakan ini tidak cepat menggelombang sebagai gerakan massal, namun cukup efektif. Stiker dan selebaran dengan berbagai jenis huruf, format, warna, ukuran dan bahan, beredar di berbagai kawasan dengan pesan yang sama, yakni:

ANDA INGIN PERUBAHAN

Anda ingin
 Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu
 Bisnis berjalan tanpa nyogok pejabat
 Keadilan berlaku untuk semua orang
 Hak-hak sebagai warga negara dilindungi
 Martabat Anda sebagai manusia dihargai
 Anda ingin kehidupan yang lebih baik
 Nyatakan bahwa Anda ingin perubahan

Kenakan pita putih di pergelangan tangan
 Setiap hari, setiap waktu
 Hingga 11 Maret 1998.

Pada saat-saat seperti itu, panggung Ratna Sarumpaet juga melebar ke kancah politik. Sutradara wanita yang sering mengalami pencekalan di beberapa kota atas dramanya Marsinah, terpilih sebagai salah satu koordinator “Siaga” (Solidaritas Indonesia untuk Amien Rais dan Megawati), yang berupaya menjagokan kedua tokoh tersebut sebagai calon presiden dan wakil presiden alternatif, selain Soeharto. Terakhir, Ratna terpaksa mendekam di ruang tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama delapan aktivis lainnya, karena mengadakan “Pertemuan Rakyat Indonesia” di Candi Bentar, Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta, tanggal 17 Maret 1998, tanpa mengantongi izin dari instansi yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Pertemuan tersebut

dimaksudkan sebagai sebuah diskusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu, yang sedang kacau di berbagai bidang. Akibat penahanan ini, Ratna Sarumpaet jatuh sakit, dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit, dengan tetap mendapat pengawasan ketat dari aparat. Baru setelah Soeharto *lengser* dari jabatan presiden atas desakan sebagian besar rakyat Indonesia, Ratna Sarumpaet lantas dibebaskan dari penjara. Dan selama ditahan segala kebutuhan hidup keluarganya, ditanggung oleh mantan suaminya.

Jika di dalam negeri Ratna Sarumpaet banyak dimusuhi aparat, di dunia internasional ia justru dihargai. Paling tidak, *The Foundation for Human Right in Asia* (FHRA) yang berpusat di Tokyo, Jepang, kemarin mengumumkan tiga nama penerima Penghargaan Hak Azasi Khusus Wanita (*The Female Human Right Special Award*), dan salah satunya Ratna Sarumpaet (*Suara Indonesia*, 8 Desember 1998)

Setelah Ratna Sarumpaet dibebaskan dari penjara, tidak henti-hentinya ia menyumbang memberi warna era reformasi. Dalam pemerintahan Habibie, Ratna tidak jengah untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat agar semangat reformasi tidak luntur. Pada saat itu, perpolitikan di Indonesia semakin panas saja. Sebab pada pemerintahan Habibie, banyak rakyat Indonesia yang tidak puas dengan gaya kepemimpinannya. Banyak rakyat merasa bahwa Habibie merupakan perpanjangan tangan dari Soeharto, dan selamanya akan melindungi para petinggi-petinggi era Orde Baru yang terkenal dengan penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ratna Sarumpaet mendukung langkah mahasiswa dan tokoh-tokoh yang mendukung reformasi untuk tidak

memperpanjang masa jabatan Habibie. Ratna beserta teman-temannya berusaha mengegolkan ide pemerintah transisi, yakni sebuah pemerintahan sementara hingga terbentuk pemerintahan yang syah hasil Pemilihan Umum yang ditetapkan dalam Sidang Umum. Ide pemerintahan transisi ini, ternyata mendapat sambutan yang positif walau banyak juga yang kontra dengan ide tersebut. Dengan ide pemerintahan transisi ini, tak jarang Ratna mendapat teror, tekanan, intimidasi bahkan sampai pembakaran rumah. Untung kebakaran tersebut segera diketahui, sehingga api tidak sempat menjalar jauh ke dalam rumah. Setelah pemerintahan dipegang oleh Abdur rahman Wahid dan Megawati, Ratna kembali menyuarakan suara keadilannya lewat panggung kesenian. Agustus tahun 1999, Ratna Sarumpaet berhasil melakukan pertunjukan keliling “Marsinah Menggugat”, sebuah monolog, tanpa ada kesulitan ijin yang berarti, karena pada saat itu, era keterbukaan dan kebebasan berekspresi benar-benar dihargai dan terbuka bagi siapa saja. Demikianlah, akhirnya “Marsinah Menggugat”-pun bisa tampil di Surabaya yang dulu merupakan “daerah terlarang” bagi dunia kesenian yang menyangkut masalah kematian Marsinah.

3. Kasus Pembunuhan Marsinah

3.1 Sosok Marsinah

Marsinah lahir di desa Nglundo - Nganjuk yang hanya berpenduduk 2000 jiwa. Dia anak ke-2 dari tiga bersaudara, yakni Marsini (kakak) dan Wijati (adik) Ketiganya hasil cinta kasih pasangan Astin dan Sumini. Ketika Marsinah berusia dua tahun dan adiknya, Wijati, berusia 40 hari, sementara Marsini (kakaknya)

juga masih kecil, ibunya meninggal dunia karena terserang penyakit malaria. Atas kesepakatan keluarga, akhirnya Marsinah diasuh oleh neneknya, Puirah, yang tinggal bersama paman dan bibinya, pasangan Suraji - Sini.

Nama kecil Marsinah adalah “Marmi”, karena sering sakit *step* maka namanya diganti dengan nama Marsinah. Demikian juga dengan nama kecil adiknya (Wijiati), dulu namanya Marsumarsih tetapi karena waktu kecil sering sakit-sakitan akhirnya namanya diganti juga.

Pada saat anak-anak kecil seusianya masih bermanja-manja dengan ibunya, Marsinah sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kondisi ini membuat Marsinah memiliki kepribadian yang tidak cengeng dan nampak lebih dewasa dari usia sebenarnya.

Marsinah bersekolah tidak melalui TK tetapi langsung masuk SD. Waktu kelas 1 - 2 SD, Marsinah pernah tidak naik kelas dua kali. Ketika dibilang bodoh oleh kakaknya, Marsinah menjawab “tidak”. Kemudian Marsinah menceritakan peristiwa yang melatarbelakanginya, yaitu Marsinah pernah berkelahi dengan teman laki-lakinya di lapangan. Ketika dileraikan oleh gurunya, bogem Marsinah mengenai gurunya. Sehingga gurunya sentimen ketika menentukan kenaikan kelas.

Kelas 6 SD, Marsinah tinggal di Karangsemi, di rumah pakdenya. Di rumah pakdenya, Marsinah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga (menyapu, menimba, mencuci dan lain-lain). Jarak antara sumur dan bak mandi agak jauh, jadi perlu kayu untuk mengangkat timba. Marsinah juga mengapak kayu untuk kayu bakar. Karena kebiasaan itu badan Marsinah jadi kekar walaupun pendek

Setelah lulus SD, Marsinah ingin melanjutkan ke SMP, namun keinginan tersebut ditolak oleh Mbah Puirah, dengan alasan tidak ada biaya. Namun Marsinah nekat mendaftarkan diri ke SMP NU Nganjuk dan kebetulan diterima. Akhirnya Marsinah pulang ke bapaknya karena bapaknya yang mendukung untuk sekolah lagi.

Lulus dari SMP, Marsinah melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Nganjuk. Sewaktu sekolah di tempat itu, minat Marsinah membaca bertambah menggebu-gebu. Buku yang paling digemari adalah riwayat hidup orang-orang besar, terutama pimpinan yang sukses berkat otodidak. Tokoh yang menjadi idolanya adalah Hamka. Karena Hamka *drop out* sekolah *ongko loro* (dua), tapi berhasil menjadi orang terkenal di tingkat nasional dan internasional. Begitu besar antusias untuk membaca, sampai-sampai kalau tidak ada yang dibaca, *cuilan* (sobekan) koran pun akan dibaca Marsinah.

Kuliah, bagi Marsinah, tidak lain untuk menambah wawasan pengetahuan. Dan itu amat penting untuk mengubah nasibnya. “Pengetahuan itu akan mengubah nasib seseorang” ucapnya. Kendati demikian, karena keadaan, untuk menambah pengetahuan itu tak harus ditempuh lewat jalur perguruan tinggi. Karena itu, setamat SMA Muhammadiyah Nganjuk, tahun 1989, Marsinah pamit untuk pergi ke Surabaya mencari pekerjaan.

Di Surabaya, Marsinah menumpang tinggal di rumah kakak kandungnya yang sudah berkeluarga. Sambil bekerja di sebuah supermarket, Marsinah tidak pernah berhenti mengirimkan surat lamarannya ke berbagai perusahaan yang memasang iklan lowongan pekerjaan. Untuk selanjutnya, Marsinah diterima kerja

di pabrik plastik SKW kawasan Rungkut. Ia juga *nyambi* jualan nasi bungkus seharga Rp 150,00 per bungkus di tempat kerjanya. Kerja di pabrik plastik itu dijalannya hanya dua bulan. Kemudian Marsinah pindah kerja ke CV Harapan - Rungkut (tempat pengemasan barang-barang Unilever). Di CV Harapan itupun, Marsinah hanya kerja beberapa bulan. Tahun 1990, ia pindah kerja di pabrik arloji, PT Catur Putra Surya, di daerah rungkut.

Banyaknya kepincangan di PT Catur Putra Surya (PT CPS), membuat Marsinah tidak bisa tinggal diam. Nama dan tindakannya mulai menghiasi lembar catatan bagian personalia. Mengetahui bahwa belum ada Serikat pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja (SPSI UK) di PT CPS Rungkut, Marsinah menuntut didirikannya wadah penampungan aspirasi buruh itu. Namun tuntutan itu bukannya dipenuhi, malahan mengakibatkan dirinya dimutasi ke pabrik yang ada di Porong - Sidoarjo tahun 1992, karena terlalu vocal.

Sejak pindah kerja di PT CPS Porong, Marsinah kos yang letaknya 6 km dari pabrik. Di sini Marsinah punya *sambilan* mengkreditkan barang-barang pada teman-temannya, seperti daster, kain sprei, dompet dan lain sebagainya. Ia *kulakan* barang-barang itu di Pasar Turi Surabaya. Ia butuh uang lebih dari yang diperolehnya di pabrik untuk menambah wawasan pengetahuan, pendidikan, yang tidak cukup hanya tentang seputar pabrik. Karena itu, di samping kerja dan mengkreditkan barang, ia juga mengikuti kursus komputer program Word Processor dan Lotus. Setelah menyelesaikan kursus komputernya, Marsinah mengikuti kursus bahasa Inggris. "Pengetahuan itu akan mengubah nasib seseorang", demikian falsafah yang pernah diucapkan Marsinah.

(Sumber dari *Marsinah, Buruh Kecil Korban Pembunuhan karena Menuntut Perbaikan Nasib*, yang disusun oleh YLBHI Surabaya dan makalah tentang kehidupan Marsinah yang diberikan pada Simposium Film Sehari Marsinah yang diadakan di Balai Wartawan Surabaya Post, 25 Maret 2000.)

3.2 Kasus Mogoknya Buruh dan Pembunuhan Marsinah

Dalam buku “Marsinah - Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan” yang ditulis oleh Alex Supartono, menyebutkan bahwa pembunuhan Marsinah diawali dengan pemogokan para buruh di PT Catur Putra Surya (CPS). PT CPS merupakan pabrik yang memproduksi aneka arloji dan jam dinding yang terletak di kawasan industri Sidoarjo. Pabrik ini memperkerjakan sekitar 500 buruh yang diantaranya terdiri dari \pm 300 pekerja perempuan. Dalam menjalankan kebijaksanaannya, perusahaan ini sangat merugikan pihak buruh dan tidak memperhatikan kaum buruh. Untuk itu, para buruh sepakat mengadakan mogok kerja dalam rangka menuntut perbaikan kondisi kerja dan kenaikan upah.

Campur tangan militer dalam setiap perkara perselisihan perburuhan menjadi hal yang wajar di Indonesia. Sebagai penjaga stabilitas, militer Indonesia merasa perlu terlibat dalam segala hal. Mulai dari urusan film sampai urusan naik haji. Mulai dari kurikulum sekolah sampai urusan buruh. Dalam perkara perburuhan dan dunia usaha, mereka juga memposisikan diri sebagai pihak yang menjaga agar semuanya berjalan lancar dan tenang. Penerapan konkritnya adalah kalau ada buruh mogok atau unjuk rasa, yang sebenarnya adalah urusan buruh dan pemilik modal (pengusaha), maka tanpa diundang mereka akan turut campur.

Demikian halnya yang terjadi pada pemogokan kerja di PT Catur Putra Surya, pihak militer juga turun tangan untuk menangani unjuk rasa tersebut.

Ketika Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman mengedarkan surat himbauan agar para pengusaha menaikkan upah buruh buruhnya 30% dari upah pokok pada bulan April 1993, maka surat himbauan ini menjadi semacam “senjata” penggerak dari akumulasi ketidakpuasan selama ini atas kondisi kerja, tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan sampai pungutan dari SPSI sendiri.

Tanggal 3 Mei 1993, merupakan hari pertama mogok kerja yang dilakukan oleh sebagian besar buruh. Pada siang harinya, petugas Koramil lantas melacak siapa yang menjadi “dalang” pemogokan kerja tersebut. Lantas tercatatlah 18 orang yang dianggap menghasut para buruh. Tanggal 4 Mei 1993, merupakan mogok hari kedua dan perundingan. Buruh yang mengikuti mogok kerja hari itu lebih banyak dibandingkan hari pertama. Petugas dari Kodim, Koramil, dan Polsek Porong sudah berada di dalam pabrik dan memaki-maki para buruh dengan sebutan “PKI”, sebuah sebutan yang dianggap buruk oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya, pada pukul 10.00 diadakan perundingan antara “pembesar” pabrik dan 24 perwakilan buruh, yang diantaranya 9 pengurus SPSI dan 19 orang dipilih langsung oleh buruh. Marsinah termasuk dari 19 orang ini. Para buruh tersebut mengajukan dua belas tuntutan, yakni:

1. Kenaikan upah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50/1992 dari Rp 1.700,00 menjadi Rp 2.500,00 per hari yang seharusnya sudah berlaku sejak 1 Maret 1992.



2. Perhitungan upah lembur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 72/1984.
3. Penyesuaian cuti haid dengan upah minimum.
4. Jaminan kesehatan buruh sesuai dengan UU No. 1/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
5. Penyertaan buruh dalam program ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja).
6. Pemberian upah Tunjangan Hari Raya sebesar satu bulan gaji sesuai dengan himbauan pemerintah.
7. Kenaikan uang makan dan uang transport.
8. Pembubaran Pengurus Unit Kerja SPSI PT CPS karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPSI.
9. Pembayaran cuti hamil pada waktunya.
10. Penyamaan upah buruh yang baru selesai masa training dengan upah buruh yang sudah bekerja selama satu tahun.
11. Hak-hak buruh yang sudah ada tidak boleh dicabut, hanya boleh ditambah.
12. Setelah pemogokan ini, pengusaha dilarang mengadakan mutasi, intimidasi, dan melakukan pemecatan terhadap buruh yang melakukan pemogokan.

Dari perundingan tersebut, menghasilkan 11 kesepakatan, yakni:

1. Upah minimum tetap berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50/Men/1992 dan kekurangan tunjangan tetap, yakni uang makan dan transport sebesar Rp. 550,00 yang sampai saat ini belum dibrikan, hari libur dan cuti tahunan akan diberikan sesuai dengan masa kerja dan ketentuan yang berlaku dimulai pada 15 Mei 1993.

2. Perhitungan upah lembur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepmen No. 72/Men/1984).
3. Pembayaran upah bagi karyawan wanita yang mengambil cuti haid diberikan sesuai dengan besar upah yang diterima.
4. Keikutsertaan dalam program ASTEK ke JAMSOSTEK akan menunggu petunjuk dan pelaksanaan lebih lanjut.
5. Jumlah THR sampai saat ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi besarnya THR diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan yang telah diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang ada di perusahaan.
6. Uang makan dan uang transport sudah masuk dalam satu kesatuan upah sebagai tunjangan tetap.
7. Keberadaan PUK SPSI yang ada di perusahaan tetap akan diakui keberadaannya dan akan difungsikan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada. Pelaksanaan reformasi kepengurusan berlaku sampai masa baktinya habis.
8. Uang cuti hamil akan diberikan sesuai dengan peraturan yang ada (secara tepat waktu).
9. Karyawan yang telah lepas dari masa percobaan, disamakan hak-haknya dengan karyawan yang lain. Tetapi ketentuan besar-kecilnya upah dan tunjangan lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
10. Sehubungan dengan unjuk rasa ini (pemogokan kerja), pengusaha dimohon tidak mencari-cari kesalahan karyawan.

11. Pihak karyawan berjanji tidak akan melakukan aksi pemogokan lagi untuk masa yang akan datang, segala permasalahan perselisihan Hubungan Industrial Pancasila akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta berpijak pada asas musyawarah untuk mencapai mufakat, dan selanjutnya karyawan sanggup kerja kembali.

Sore harinya, tanggal 4 Mei 1993, beberapa orang buruh yang dianggap dalang pemogokan mendapat surat panggilan dari Kodim 0816 Sidoarjo. Jumlah buruh yang dipanggil Kodim sebenarnya 16 orang, namun esok harinya yang datang hanya 13 orang. Menanggapi surat panggilan ini Marsinah berinisiatif membuat tulisan yang isinya semacam panduan atau petunjuk bagi rekan-rekannya yang mendapat panggilan tersebut untuk menjawab interogasi di Kodim besok pagi. Tulisan tersebut diberikan Marsinah pada salah satu rekannya untuk dibagikan, sambil mengatakan bahwa bila mereka diancam akan dimejahijaukan oleh Kodim, ia akan membawa persoalan ini pada pamannya di Kejaksaan Surabaya.

Rabu, 5 Mei 1993, 13 buruh memenuhi panggilan dan datang ke Markas Kodim 0816 Sidoarjo pada pukul 09.00. Di Kodim tersebut, para buruh yang dipanggil didesak agar mereka mengundurkan diri dari PT CPS. Merekapun akhirnya memenuhi desakan tersebut karena di bawah intimidasi aparat Kodim. Setelah surat pengunduran diri tersebut ditandatangani oleh mereka dengan terpaksa, maka pihak Kodim segera menyampaikannya pada pejabat PT CPS, dengan menjanjikan akan memperjuangkan juga masalah uang pesangon. Pukul 17.00, uang pesangon diberikan oleh pihak perusahaan di Kodim, tempat para

pekerja tersebut menunggu. Pada saat itupun, pihak Kodim senantiasa menunjukkan kekuasaannya, sehingga membuat pihak perusahaan juga ketakutan dan tegang. Setelah pihak perusahaan pulang, para buruh ditraktir makan di kantin Kodim oleh Serka Karnadi. Adapun rata-rata tiap buruh menerima pesangon kurang dari Rp 170 000,00.

Pada hari yang sama, 5 Mei 1993, kegiatan Marsinah berkaitan erat dengan pemanggilan ke-13 rekannya di Kodim. Setelah menemui rekannya, Mutmainah yang sedang rapat dengan Mutiari, pada pukul 14.35, Marsinah menemui rekannya yang lain untuk mengingatkan pertemuan mereka nanti malam di rumah pondokan Yudo. Lantas di pondokannya sendiri, Marsinah menyusun surat pernyataan untuk perusahaan yang isinya mempertanyakan mengapa setelah unjuk rasa yang telah diselesaikan lewat kesepakatan bahwa tidak akan ada pihak yang dirugikan, justru masih ada panggilan dari Kodim kepada sejumlah buruh. Marsinah, dalam surat itu, mengancam kalau tuduhan terhadap buruh tidak dicabut, dia akan memperkarakan perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menjelang Maghrib, Marsinah keluar dari pondokan untuk memfotocopi surat pernyataan yang baru dibuatnya. Setelah memfotocopi, Marsinah menanyakan nasib teman-temannya yang dipanggil di Kodim. Pukul 19.00, Marsinah bersama temannya ke Kodim, namun ke-13 rekannya sudah pulang. Lantas Marsinah kembali ke pondokannya. Pukul 20.00, Marsinah minta diantar temannya ke PT CPS untuk mengantarkan surat yang sudah difotocopinya. Menjelang pukul sembilan malam, Marsinah dan temannya bertemu dengan salah

satu rekannya yang dipanggil oleh Kodim. Ia menanyakan perihal surat panggilan dan surat pengunduran diri. Mereka lantas terlibat perbincangan mengenai pengunduran diri dari PT CPS yang dinilai terdapat unsur pemaksaan. Lantas Marsinah memberi rekan-rekannya surat yang sudah difotocopynya, yang salah satunya telah diberikan pada PT CPS. Marsinah memang berniat mengadakan perusahaan dan Kodim, yang dinilainya mencari-cari masalah dengan memaksa agar para buruh mengundurkan diri, ke pengadilan. Malam telah larut, lantas Marsinah mengajak rekan-rekannya mencari makan. Namun mereka menolak karena telah larut malam. Rekan-rekannya kembali ke pondokannya masing-masing dan saat itulah Marsinah terakhir terlihat dalam keadaan hidup.

Tanggal 10 Mei 1993, 12 buruh PT CPS mengadakan nasib mereka ke DPRD dan Kantor Depnaker Sidoarjo. Salah satu buruh yang pernah dipanggil Kodim melaporkan bahwa yang paling menakutkan dalam PHK ini adalah keterlibatan aparat Kodim 0816 Sidoarjo. Ketika dikonfirmasi oleh wartawan "Surabaya Post", Kodim 0816 Sidoarjo menyatakan dalam hal ini mereka hanya membantu penyelesaian. Lantas berbagai kejadian dan orang-orang yang terlibat di perusahaan dipaparkan begitu terperinci, yang dikemudian hari nama-nama itu dijadikan *kambing hitam* oleh pihak kepolisian dan Militer. Hal ini terjadi karena pada tanggal 8 Mei 1993, mayat Marsinah di temukan di desa Nglundo - Nganjuk. Mayat Marsinah ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Marsinah meninggal sehari sebelum mayatnya ditemukan. Penyebab kematiannya adalah akibat tusukan benda runcing. Perutnya luka

selebar 20 cm, dagunya memar, lengan dan pahanya lecet, selaput daranya robek, dan tulang kelamin bagian depannya hancur akibat dimasuki benda tumpul.

Kematian tragis buruh perempuan ini, pertama kali dimuat oleh mingguan di Surabaya, yang saat ini sudah tidak terbit lagi, *Surabaya Minggu*. Awalnya belum ada reaksi yang cukup signifikan menanggapi kasus ini. Baru tanggal 26 Mei 1993, hampir sembilan YLBHI Jakarta mengadakan konferensi pers lewat humasnya, Hendaridi. Mereka mendesak agar kepolisian segera menuntaskan kasus pembunuhan ini, sebab mereka yakin bahwa kematian Marsinah bukanlah kriminal biasa tetapi berkaitan dengan demonstrasi mogok kerja sebelumnya. Awal Juli 1993, 27 LSM dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk KSUM (Komite Solidaritas Untuk Marsinah).

Sampai satu bulan setelah mayat Marsinah ditemukan, pihak kepolisian masih dalam tahap “Penyelidikan Penyebab Kematian Seseorang”, apakah mati secara wajar atau tidak. Sejak awal penyelidikan yang mereka lakukan terkesan simpang siur antara pejabat kepolisian dan petinggi militer.

3.3 Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah

Kematian Marsinah menimbulkan opini di masyarakat bahwa kematiannya bukanlah sekedar kriminal biasa, namun berkaitan erat dengan perannya dalam unjuk rasa dan pemogokan di perusahaannya. Polda Tatim, Mayjen Emon Rifai, dengan keras kepala menyalahkan apriori media massa yang telah membentuk opini publik. Bulan-bulan berlalu dan belum ada

penyelesaiannya. Pembunuhan Marsinah kemudian mendapat reaksi yang cukup besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sampai awal September 1993, pernyataan resmi tim pengusutan kasus Marsinah mengumumkan bahwa mereka sudah menemukan barang bukti sebuah mobil dan sebatang besi yang diduga dipakai untuk menghabisi Marsinah. Namun apa yang diyakini polisi sebagai *titik terang* ini seakan terputus oleh peristiwa lain yang makin ruwet, yakni penculikan para tersangka pembunuh Marsinah. Dari penculikan, penangkapan, dan penyiksaan para tersangka pembunuh Marsinah, diketahui adanya rekayasa skenario yang ingin dikembangkan dalam menuntaskan kasus pembunuhan Marsinah.

Di tengah jalannya proses penyelidikan yang dilakukan, pihak kepolisian telah memeriksa 142 saksi sesuai prosedur. Tiba-tiba 9 dari saksi-saksi itu menghilang sejak tanggal 1 Oktober 1993. Mereka baru muncul tanggal 19 Oktober 1993 di tahanan Polda Jatim. Baru pada tanggal itulah diketahui bahwa mereka ditangkap berdasarkan surat penangkapan tanggal 30 September 1993 dan surat penahanan tanggal 2 Oktober 1993. Para tersangka ini baru menandatangani kedua surat tersebut setelah lebih dari dua pekan menghilang. Penangkapan model “siluman” ini tentu saja membingungkan para keluarga tersangka. Mereka kelabakan mencaritahu di mana sanak keluarganya berada. Mereka mencari ke Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Bakorstanasda Jatim, dan sampai mengadu ke DPRD Jatim. Namun semua pihak itu menyatakan “tidak tahu!”

Cara penangkapan yang merupakan tindak pelecehan serius terhadap KUHAP ini, segera mengundang berbagai reaksi protes berbagai kalangan praktisi

hukum, LSM, dan para aktivis buruh. Seluruh prosedur hukum telah dilanggar dan pemeriksaan terhadap para tersangka selanjutnya menjadi tidak sah serta tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka menuntut agar para penculik tersangka segera ditangkap, diadili, dan dihukum terlebih dahulu, baru proses penyelidikan dilanjutkan.

Kekerasan penyidikan dan penyelidikan terhadap para tersangka, Yudi Susanto dan kawan-kawannya, yang jelas menggunakan metode penuduhan para tersangka agar mau patuh terhadap skenario yang disodorkan penyidik, telah melahirkan tindakan pelanggaran KUHP secara serius, antara lain;

1. Perlakuan secara tidak manusiawi, dengan dalih penegakan hukum, melalui berbagai tindakan kekerasan, penculikan, dan penyiksaan;
2. Hak-hak tersangka untuk memperoleh surat penangkapan, penahanan, serta diberitahukan pada pihak keluarga atas tindakan penyidikan para tersangka;
3. Hak untuk didampingi penasehat hukum.
4. Penyitaan dan penggeledahan secara tidak sah; dan sebagainya.

Berbagai pelanggaran tersebut diperparah lagi dengan keterlibatan pihak yang secara hukum sama sekali tidak berhak untuk melakukan penyidikan, yaitu pihak militer, yang dalam hal ini aparat Kodam V Brawijaya. Ironisnya, aparat yang telah melanggar, sulit sekali tersentuh oleh hukum.

Kesembilan tersangka itu dipaksa untuk mengakui perbuatan sesuai dengan skenario yang dibuat oleh militer. Jika tidak sesuai dengan skenario, maka para tersangka tersebut disiksa dengan berbagai macam jenis siksaan. Jenis siksaan tersebut misalnya: ditendang, dipukuli, disundut rokok, ditelanjangi, ibu

jari dan alat vitalnya disetrum, disuruh merangkak, disuruh makan rumput, dan lain-lain. Akhirnya kesembilan tersangka tersebut mau-tidak mau menuruti skenario yang telah dimuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menandatangani serta mengakui bahwa mereka telah merencanakan untuk membunuh Marsinah.

Pada saat persidangan, semula para tersangka mengakui perbuatan membunuh Marsinah sesuai skenario. Namun pada akhirnya mereka berani mencabut BAP dan menyatakan naik banding. Setelah banyak ditemui kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan atas pengakuan para tersangka tersebut, akhirnya mereka boleh naik banding hingga tingkat Mahkamah Agung. Pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan membebaskan sembilan tersangka tersebut karena mereka sama sekali tidak terbukti membunuh Marsinah. Majelis menilai pencabutan BAP beralasan karena terdapat cukup bukti bahwa selama pemeriksaan dan proses penandatanganan BAP, para terdakwa tersebut di bawah tekanan dan siksaan.

Sejak awal ditemukannya mayat Marsinah, disusul penculikan para tersangka, sampai pengadilan, terdapat sebuah dinamika yang ambigu. Di satu pihak, polisi bersedia mengusut dan mencari siapa pembunuh Marsinah. Pada saat yang sama, muncul usaha yang sangat kuat untuk menutupi keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan Marsinah ini. Ambiguitas inilah yang menjadi sumber utama berbagai kejanggalan dan melahirkan skenario rekayasa pembunuhan Marsinah, dan juga melanggar hak-hak korban sembilan tersangka serta mencuci otak

tersangka guna menghapus segala ingatan tentang tindakan kekerasan terhadap mereka.

Sebenarnya berbagai lembaga independen non pemerintah yang menaruh perhatian besar terhadap kasus Marsinah ini, jauh hari sudah mensinyalir bahwa ada indikasi kuat penganiayaan Marsinah justru terjadi di Kodim Sidoarjo. Dugaan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa selama ini Kodim 0816 Sidoarjo biasa terlibat dengan masalah perburuhan. Menurut YLBHI, dalam konferensi persnya tanggal 7 Maret 1994, pada saat Marsinah datang ke Kodim - Sidoarjo memprotes PHK teman-temannya itu, kedatangannya disambut dengan intimidasi dan siksaan. Penganiayaan tersebut dimaksudkan agar Marsinah jera, namun perbuatan mereka *kelewatan* hingga merenggut nyawa Marsinah. Karena insiden *kelewatan* inilah dipaksalah polisi untuk “berkorban” dengan membuat skenario rekayasa yang melibatkan sembilan tersangka di kalangan PT CPS.

Dalam proses penyelesaian kasus Marsinah, dari babak I sampai babak III yang saat ini (tahun 2000) sedang berlangsung, tampak jelas proses *defends* dari pihak militer sehubungan dengan campur tangan mereka dalam politik perburuhan. Sebab, bila kasus Marsinah ini terbongkar tuntas, maka campur tangan militer dalam politik perburuhan di Indonesia akan ditelanjangi dari dua sisi. Pertama, peran mereka sebagai kekuatan penindas kaum buruh dengan imbalan jasa dari kaum pemilik modal. Kedua, akan terbongkar bahwa selain sebagai preman yang dibayar oleh kaum modal, mereka setiap saat bisa menjadi kekuatan yang memukul balik kaum pemilik modal ini, bila sampai terjadi

masalah dalam hubungan mereka. Pembukaan kasus ini juga merupakan ancaman bagi kaum pemilik modal.

Dalam kasus Marsinah terlihat jelas proses melindungi kepentingan dengan menutup kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain oleh militer. Campur tangan militer dalam kasus perselisihan perburuhan di PT CPS, dengan memecat para buruh di markas Kodim adalah kejahatan yang pertama. Ketika ada usaha untuk mengungkap kejahatan pertama ini, yang dilakukan oleh Marsinah dengan mempertanyakan mengapa sampai terjadi PHK di markas Kodim, ditutup dengan kejahatan baru yaitu dengan membunuh Marsinah. Hal ini adalah tindakan kejahatan mereka yang kedua. Konsekuensi logisnya, yakni usaha untuk menangkap pembunuh Marsinah harus ditutup dengan kejahatan ketiga, yaitu mencari *kambing hitam* dan menyiksa sembilan orang yang dijadikan tersangka untuk mengaku sebagai pembunuh Marsinah. Proses penutupan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain ini, kemudian menjadi sebuah kejahatan politik.

Perlu disadari oleh masyarakat bahwa Marsinah hanyalah puncak dari sebuah gunung es permasalahan umum di negara ini. Yang harus diingat, mogok kerja yang merupakan hak asasi buruh, yang sering dikategorikan sebagai gangguan keamanan, hendaknya tidak ditangani dengan gaya-gaya anarkhis. Pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana mengasingkan interaksi-interaksi kekuasaan di dalam institusi hukum. Kalaupun kemudian tewasnya Marsinah tidak terungkap, perjuangan Marsinah tidak tercapai, protes atas keterlibatan militer justru mengakhiri hidupnya, lalu bagi hukum menjawabnya sampai saat ini

bagaimana? Bagaimanapun lembaga peradilan bagi masyarakat merupakan benteng terakhir untuk memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Dapat Hadiah, Apa Benar”. *Suara Indonesia*. 8 Desember 1998, hal. 1. Surabaya
- F.12. 1-15 Juli 1992. “Ratna Sarumpaet: Artis Porno, “Produk” dari Rumah Tidak Baik”, *Famili*, no.55/II, hal.70-73. Jakarta
- Purwono, Danis. 21-27 Februari 1991. “Satu Keluarga Punya Minat Sama dan Berprestasi”, *Femina*, no.8/xix, hal. 38-41 dan 45-46. Jakarta
- Sarumpaet, Ratna. 1997. *Marsinah, Nyanyian dari Bawah Tanah*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Supartono, Alex. 1999. *Marsinah, Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia
- Syamsi, Indra. 28 November-11 Desember 1990. “Ratna Sarumpaet: Orang Kesepian Berarti Tak Punya Sikap”, *Kiblat*, no. 44/xxvii, hal. 49-50. Jakarta
- Syukri, Fadil. 5 Oktober 1991. “Ratna Sarumpaet: Tak Pernah Mau Kalah”, *Mutiara*, th. 25 no. 575, hal.1-5. Jakarta
- Tim YLBHI. 1995. *Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah (Catatan bagi Revisi KUHAP)*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia